



# **POLITIK ISLAM DAN MASYARAKAT MADANI**

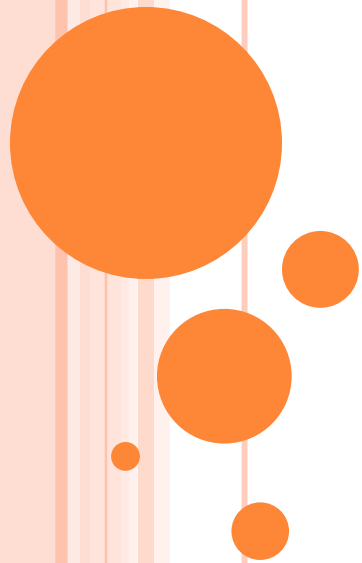
**OLEH:  
DENNY PRITIANTO  
SA'ADAH NURAINI  
LINA DWI ASTUTI**

# PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah Negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Bahkan jumlah umat Islam di Indonesia merupakan yang terbanyak di antara negara-negara di dunia seketrang ini. Dalam konteks politik, Indonesia mengalami kesulitan yang cukup serius dalam membangun hubungan politik antara agama (Islam) dengan negara. Hal ini juga terjadi di negara-negara lain yang penduduknya mayoritas beragama Islam seperti Maroko, Aljazair, Libia, Pakistan, dan Turki. Hubungan politik antara Islam dan Negara di Negara-negara tersebut ditandai oleh ketegangan-ketegangan yang tajam, jika bukan permusuhan (Bahtiar Effendy, 1998:2).



# PRINSIP-PRINSIP DASAR POLITIK ISLAM



# TEORI POLITIK ISLAM DAN TOKOH-TOKOHNYA

Munawir Sadzali mengklasifikasikan pemikiran berbagai tokoh tentang politik Islam menjadi tiga aliran pemikiran, yaitu:

1. Berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Tokohnya: Hasan al-Banna, sayyied Quthub, Muhammad Rasyid Ridla, al-Maududi.
2. Berpendirian bahwa Islam tidak berhubungan dengan ketatanegaraan. Tokohnya: Ahmad Luffi Sayyid, Ali Abdul Raziq, dan Thaha Husain.
3. Berpendirian bahwa Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan tetapi terdapat nilai etika. Tokohnya: Muhammad Hisain Haikal.



Terlepas dari ketiga aliran tersebut, ada dua bentuk praktik politik Islam di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam :

- Ada yang secara legal-formal menjadikan Islam sebagai dasar negaranya,
- Tidak secara legal-formal menjadikan Islam sebagai dasar negaranya.



# PRINSIP-PRINSIP POLITIK DALAM ISLAM

Prinsip-prinsip politik Islam, terutama terkait dengan kepemimpinan, ditinjau dari perspektif al-Quran dan Hadist:

1. Tidak memilih orang kafir sebagai pemimpin, orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang mempermainkan agama atau shalat, musuh Allah Swt dan musuh orang mukmin, dan orang-orang yang lebih mencintai kekufuran daripada iman.
2. Pemimpin dapat diterima ummatnya.
3. Pemimpin mengerti bahwa status kepemimpinannya adalah amanah dari Allah.
4. Pemimpin yang memperhatikan kepentingan kaum Muslim.

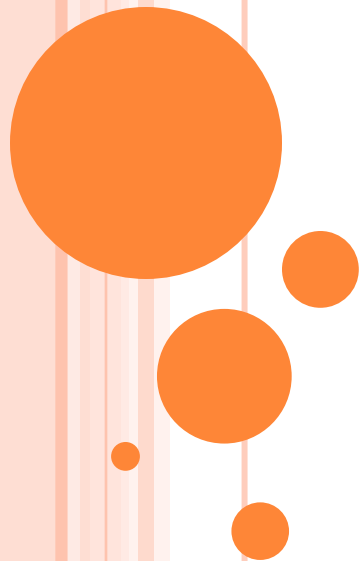


Shalahuddin Sanusi (1964) merumuskan dasar-dasar kepemimpinan dalam Islam sebagai berikut :

1. Persamaan dan persaudaraan.
2. Dalam kehidupan masyarakat yang dipimpinnya harus menegakkan dan memelihara hubungan persaudaraan.
3. Kepemimpinan merupakan amanat, tugas, atau kewajiban yang harus dilaksanakan pemimpin.
4. Dalam melaksanakan kepemimpinan, ia harus bermusyawarah untuk mengambil keputusan.
5. Hukum itu hanyalah pada Allah Swt.
6. Ketaatan ummat kepada pemimpin.
7. Ummat wajib taat kepada pemimpin yang mereka amanati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang dipercayakan kepadanya.



# KONSEP MASYARAKAT MADANI DAN PRINSIP-PRINSIPNYA





# PENGERTIAN MASYARAKAT MADANI

- Bahasa Arab → madaniy, madana
  - (mendiami, tinggal atau membangun)
  - yang beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata (Munawwir, 1977:1320)
- Bahasa Inggris → civil society atau madinan society (masyarakat sipil)

**Masyarakat madani yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban dan demokrasi.**



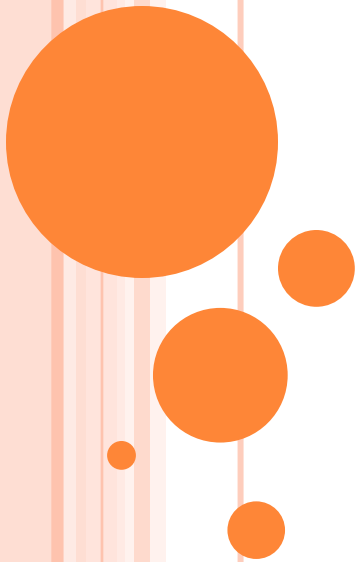
# PRINSIP MASYARAKAT MADANI

Prinsip dasar menurut al-Umari (1995:63-120) :

1. Sistem *muakhah* (persaudaraan)
2. Ikatan iman
3. Ikatan cinta
4. Persamaan si kaya dan si miskin
5. Toleransi umat beragama



# POLITIK ISLAM DAN MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA



# KONSTELASI POLITIK ISLAM DI INDONESIA

Partai Islam yang dinentuk pasca kemerdekaan adalah Masyumi, Perti, PSII, dan NU. Masyumi dibentuk dalam Mukhtamar Islam Indonesia di Yogyakarta tanggal 7-8 November 1945. Dalam mukhtamar ini diputuskan bahwa Masyumi merupakan satu-satunya partai politik Islam di Indonesia, dan Masyumilah yang akan memperjuangkan nasib politik umat Islam di Indonesia (A. Syafi'i Ma'arif, 1985:111-112).



Hubungan Islam dan Negara pada masa Orde Baru ini menurut Abdul Aziz Thaba (1996:240-302) bisa dikelompokkan menjadi tiga kategori hubungan, yaitu:

1. hubungan yang bersifat antagonistik (1966-1981)
2. hubungan yang bersifat resiprokal-kritis (1982-1985)
3. hubungan yang bersifat akomodatif (1986-1998)



# MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA

- Masyarakat madani ditegakkan atas dasar dua semangat, yakni:
  1. Semangat rabbaniyah
  2. Semangat insaniyah
- Terbentuknya masyarakat madani merupakan bagian mutlak dari wujud cita-cita kenegaraan, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Masyarakat madani tidak akan terwujud jika hukum tidak ditegakkan dengan adil, yang dimulai dengan ketulusan komitmen pribadi.



# PENUTUP

- Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa kenyataan yang ada ternyata masih jauh dengan politik islam yang bersumber pada al Quran dan Sunnah. Indonesia, yang merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim, memang sudah tepat memilih prinsip masyarakat madani sebagai cita-cita dalam mewujudkan bentuk masyarakat. Namun demikian, kita perlu menegakkan keterbukaan, kebersamaan, dan persamaan hak bagi semua orang.

